

**REKAP SANKSI KPI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN (TV)
TERKAIT PELANGGARAN PROGRAM DI MASA PEMILU 2014**

(20 Sept 2013 – 9 Jul 2014)

2013

No	TGL	PROGRAM	PELANGGARAN	TV	SANKSI
1	20 Sept	Menyiarkan Konvensi Partai Demokrat (15 September 2013)	Keberimbangan UU Penyiaran: Pasal 14 (1), Pasal 36 (4) P3: Pasal 11, Pasal 22 (1-3) SPS: Pasal 11 (1), Pasal 40 (a)	TVRI	Teguran Tertulis (1) Membuat pernyataan tertulis
2	27 Sept	SURAT EDARAN PENGUNAAN SPEKTRUM UNTUK KEGIATAN TERTENTU	Mengingatkan agar semua TV menjaga netralitas lembaga penyiaran dan larangan penggunaan media untuk kepentingan golongan tertentu	All	
3	5 Des	Headline News (11 Nov 2013): Pidato Surya Paloh berdurasi 3:43 menit di acara pelantikan fungsionaris Partai Nasdem Pidato Surya Paloh banyak ditemui di program lain dengan durasi 3-6 menit.	Pemanfaatan siaran untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok pemilik Menyiarkan iklan politik di luar masa kampanye UU 8/2012 tentang Pemilu: Pasal 83 (2) P3: Pasal 11 SPS: Pasal 11 (1-2)	MetroTV	Teguran Tertulis (1) Perintah mengedit logo partai dalam iklan

4	5 Des	<p>a. Iklan WIN-HT versi Pakaian Adat (30 Nov 2013)</p> <p>Deklarasi WIN-HT, Juli 2013</p> <p>b. Iklan lain yang menampilkan logo dan nomor urut Partai Hanura</p> <p>c. Program jurnalistik</p>	<p>Menayangkan iklan kampanye di luar masa kampanye</p> <p>UU 8/2012: Pasal 100, Pasal 83</p> <p>P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)</p> <p>Pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok.</p> <p>September 2013: Dari 39 berita politik, 17 berisi Hanura.</p> <p>25 Oktober 2013: Dari 5 segmen berita politik, semua berisi Hanura.</p> <p>1 November 2013: 3 segmen berita politik, semua berisi Hanura</p> <p>1 Desember 2013: 1 segmen berita untuk Hanura</p>	MNC TV	Teguran Tertulis (1)
5	5 Des	<p>a. Kuis Indonesia Cerdas (26 Nov 2013)</p> <p>Deklarasi WIN-HT, Juli 2013</p>	<p>Kuis yang dibiayai atau disponsori oleh Peserta Pemilu (Hanura)</p> <p>P3: Pasal 50 (4)</p>	Global TV	<p>Teguran Tertulis (1)</p> <p>Editing logo partai</p>

		<p>b. Iklan politik dengan logo dan nomor urut partai</p> <p>c. Program jurnalistik</p>	<p>SPS: Pasal 71 (4) UU Pemilu: Pasal 100</p> <p>Iklan kampanye di luar masa kampanye UU Pemilu: Pasal 83 (2)</p> <p>September 2013: Dari 52 segmen berita, 33 tentang Hanura.</p> <p>25 Oktober 2013: 3 segmen berita, semua tentang Hanura</p> <p>1 November 2013: 4 segmen berita, semua Hanura</p> <p>1 Desember 2013: 2 segmen berita, semua Hanura</p>		
6	5 Des	<p>a. Kuis Kebangsaan (1 Desember 2013) – tayang sejak Oktober 2013</p> <p>b. Iklan politik dengan logo dan nomor urut partai</p> <p>c. Program jurnalistik</p>	<p>Kuis yang dibiayai atau disponsori oleh Peserta Pemilu (Hanura)</p> <p>P3: Pasal 50 (4) SPS: Pasal 71 (4)</p> <p>UU Pemilu: Pasal 100</p> <p>Penyalahgunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya.</p>	RCTI	<p>Teguran Tertulis (1)</p> <p>Editing logo partai</p>

			<p>September 2013 43 segmen berita politik, 21 tentang Hanura</p> <p>25 Oktober 2013: 4 segmen berita, semua tentang Hanura</p> <p>1 November 2013: 2 segmen, semua Hanura</p>		
7	5 Des 2013	<p>a. Iklan ARB-Golkar versi 49 Tahun Golkar (24 Oktober 2013)</p> <p>b. Iklan lain yang menampilkan logo dan nomor urut partai</p>	<p>Pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok</p> <p>Iklan kampanye di luar masa kampanye.</p> <p>Oktober 2013: 430 spot</p> <p>November 2013 (12 hari): 128 spot</p> <p>SPS: Pasal 11 (2) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)</p>	ANTV	<p>Teguran Tertulis (1)</p> <p>Editing logo partai</p>
8	5 Des	a. Iklan ARB-Golkar versi 49 Tahun Golkar (24 Oktober 2013)	<p>Pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok</p> <p>Iklan kampanye di luar masa kampanye.</p>	TV One	<p>Teguran Tertulis (1)</p> <p>Editing logo partai</p>

		b. Iklan lain yang menampilkan logo dan nomor urut partai	Oktober 2013: 430 spot November 2013 (12 hari) 128 spot		
			2014		
9	23 Jan	SURAT EDARAN TENTANG PENYIARAN IKLAN POLITIK TERKAIT PEMILU	1. Mengingatkan agar menjaga netralitas isi siaran 2. Terjadi pelanggaran terhadap larangan pemanfaatan lembaga penyiaran oleh pemilik dan/atau kelompoknya 3. Bawaslu: iklan kampanye di luar jadwal adalah tindak pidana pemilu.	all	
10	23 Jan	PETUNJUK PELAKSANAAN TERKAIT PERLINDUNGAN KEPENTINGAN, SIARAN JURNALISTIK, IKLAN, dan PEMILU	Menegaskan kode etik siaran jurnalistik Menegaskan prinsip non-intervensi Menegaskan ketentuan iklan kampanye Iklan harus bayar	all	
11	24 Jan	Kuis Kebangsaan (21 Desember 2013)	Program dibiayai/disponsori oleh partai politik Tidak menjaga netralitas isi siaran Pemanfaatan untuk kepentingan pribadi pemilik dan/atau kelompoknya	RCTI	Teguran Tertulis Kedua (2)

			P3: Pasal 11, Pasal 50 (4) SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 71 (4)		
12	24 Jan	Kuis Indonesia Cerdas (24 Desember 2013)	Program dibiayai/disponsori oleh partai politik Tidak menjaga netralitas isi siaran Pemanfaatan untuk kepentingan pribadi pemilik dan/atau kelompoknya P3: Pasal 11, Pasal 50 (4) SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 71 (4)	Global TV	Teguran Tertulis Kedua (2)
13	4 Feb	Sinetron Tukang Bubur Naik Haji (1 Februari 2014)	Memanfaatkan program siaran untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran dan/atau kelompoknya. SPS: Pasal 11 (1-2).	RCTI	Teguran Tertulis (???)
14	12 Feb	Mewujudkan Mimpi Indonesia (7 Februari 2014) Capres Wiranto menyamar menjadi tukang becak	Penyalahgunaan lembaga siaran untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya. P3: Pasal 11 SPS: 11 (1-2)	RCTI	Teguran Tertulis (???)
15	20 Feb	Kuis Kebangsaan (9 Februari 2014)	Tidak menjaga netralitas isi siaran. Penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi pemilik dan/atau kelompoknya	RCTI	Penghentian Sementara

			P3: Pasal 11 SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 71 (3)		
16	20 Feb	Kuis Indonesia Cerdas (9 Februari 2014)	Tidak menjaga netralitas isi siaran. Penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi pemilik dan/atau kelompoknya P3: Pasal 11 SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 71 (3)	GlobalTV	Penghentian Sementara
17	7 Maret	Mewujudkan Mimpi Indonesia Capres Wiranto menyamar. Hary Tanoe ke pasar.	Penyalahgunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan pribadi pemilik dan/atau kelompoknya P3: Pasal 11 SPS: Pasal 11 (1-2)	RCTI	Teguran Tertulis Kedua (2) (???)
18	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	TV One	Teguran (???)
19	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	MetroTV	Teguran (???)
20	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	Indosiar	Teguran
21	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	MNC TV	Teguran (???) *Teguran (1) 5 Desember 2013
22	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	GlobalTV	Teguran (???)
23	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	ANTV	Teguran (???) *Teguran Tertulis (1) -

					5 Desember
24	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	RCTI	Teguran (???)
25	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	SCTV	Teguran
26	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	Trans TV	Teguran
27	11 Maret	Iklan Kampanye	Iklan kampanye di luar jadwal kampanye	Trans 7	Teguran
28	24 Maret	Iklan Partai Nasdem (19 Maret 2014) "Kehadiran Anggota DPR RI hanya 48,7%"	Pemanfaatan siaran iklan untuk kepentingan pribadi pemilik dan/atau kelompoknya. P3: Pasal 11 SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 58 (4a)	MetroTV	Teguran Tertulis (???)
29	27 Maret	SURAT EDARAN TERKAIT PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	Tidak menyiarkan pemberitaan dan iklan yang melanggar aturan. Tidak memfitnah, menghasut, menyesatkan, berbohong, mendiskreditkan calon atau tokoh politik tertentu.	all	
30	28 Maret	Iklan 'Kutunggu Janjimu' (22 Maret 2014, jam 04.39 WIB)	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: 58 (1 & 4a)	RCTI	Teguran Tertulis (???) Larangan menyangkan kembali

31	28 Maret	Iklan 'Kutunggu Janjimu' (24 Maret 2014, jam 22.02 WIB)	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: 58 (1 & 4a)	MNC TV	Teguran Tertulis (???) Larangan menyangkan kembali
32	28 Maret	Iklan 'Kutunggu Janjimu' (24 Maret 2014, jam 04.27 WIB)	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: 58 (1 & 4a)	Global TV	Teguran Tertulis (???) Larangan menyangkan kembali
33	28 Maret	Iklan Partai Nasdem (23 Maret 2014) 'Kehadiran Anggota DPR Hanya 48,7%'	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: Pasal 58 (1 & 4a)	SCTV	Teguran Tertulis (???) *Teguran 11 Maret
34	28 Maret	Iklan Partai Nasdem (24 Maret 2014) 'Kehadiran Anggota DPR Hanya 48,7%'	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: Pasal 58 (1 & 4a)	TransTV	Teguran Tertulis (???) *Teguran 11 Maret
35	28 Maret	Iklan Partai Nasdem (23 Maret 2014)	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain	TVRI	Teguran Tertulis

		'Kehadiran Anggota DPR Hanya 48,7%'	Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: Pasal 58 (1 & 4a)		
36	28 Maret	Iklan Partai Nasdem (23 Maret 2014) 'Kehadiran Anggota DPR Hanya 48,7%'	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: Pasal 58 (1 & 4a)	MNC TV	Teguran Tertulis (???)
37	28 Maret	Iklan Partai Nasdem (24 Maret 2014) 'Kehadiran Anggota DPR Hanya 48,7%'	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: Pasal 58 (1 & 4a)	RCTI	Teguran Tertulis (???)
38	28 Maret	Iklan Partai Nasdem (24 Maret 2014) 'Kehadiran Anggota DPR Hanya 48,7%'	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI) P3: Pasal 43 SPS: Pasal 58 (1 & 4a)	Indosiar	Teguran Tertulis (???) *Teguran 11 Maret
39	28 Maret	Iklan Partai Nasdem (22 Maret 2014) 'Kehadiran Anggota DPR Hanya	Menyinggung atau merendahkan pribadi atau kelompok lain Etika Pariwara Indonesia (EPI)	TV One	Teguran Tertulis (???)

		48,7%'	P3: Pasal 43 SPS: Pasal 58 (1 & 4a)		
40	4 April	Iklan Kampanye Partai Hanura (21-23 Maret 2014)	Menayangkan iklan melebihi batas maksimum (10 spot/hari/peserta pemilu), yaitu: 16 spot/hari (21 Maret) 15 spot/hari (22 Maret) 12 spot/hari (23 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	Global TV	Teguran Tertulis (???)
41	4 April	Iklan Kampanye Partai Hanura (21 & 23 Maret 2014)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 12 spot/hari (21 Maret) 11 spot/hari (23 Maret 2014). UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	MNC TV	Teguran Tertulis (???)
42	4 April	Iklan Kampanye Partai Hanura (21-23 Maret 2014)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 14 spot/hari (21 Maret) 15 spot/hari (22 Maret) 15 spot/hari (23 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1)	RCTI	Teguran Tertulis (???)

			P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)		
43	4 April	Iklan Partai Golkar (21-22 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 15 spot/hari (21 Maret) 21 spot/hari (22 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	ANTV	Teguran (???)
44	4 April	Iklan Partai Golkar (21-23 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 13 spot/hari (21 Maret) 18 spot/hari (22 Maret) 21 spot/hari (23 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	TV One	Teguran (???)
45	4 April	Iklan Partai Nasdem (21-22 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 15 spot/hari (21 Maret) 11 spot/hari (22 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	MetroTV	Teguran (???)

46	4 April	Iklan Partai Demokrat (21-23 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 20 spot/hari (21 Maret) 15 spot/hari (22 Maret) 17 spot/hari (23 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	SCTV	Teguran (???)
47	4 April	Iklan Partai Demokrat (21-23 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 16 spot/hari (21 Maret) 19 spot/hari (22 Maret) 19 spot/hari (23 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	Indosiar	Teguran (???)
48	8 April	Iklan Partai Gerindra (29-30 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: 14 spot/hari (29 Maret) 13 spot/hari (30 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	TransTV	Teguran (???)

49	8 April	Iklan Partai Gerindra dan PPP (28-29 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu (masing-masing): 11 spot/hari (28 Maret) 11 spot/hari (29 Maret) UU Pemilu: Pasal 97 (1) P3: Pasal 50 (5) SPS: Pasal 71 (6)	TVRI	Teguran (???)
50	8 April	Iklan Partai Gerindra & Hanura (29-30 Maret)	Menayangkan iklan kampanye melebihi batas maksimum, yaitu: Gerindra 16 spot/hari (29 Maret) 14 spot/hari (30 Maret) Hanura 11 spot/hari (29 Maret)	Trans7	Teguran (???)
	9 APRIL		PEMILU LEGISLATIF		
51	30 Mei	Pemberitaan Pasangan Capres/Cawapres (19-25 Mei 2014)	Tidak diperhatikannya netralitas isi siaran Tidak diperhatikannya prinsip-prinsip jurnalistik UU Penyiaran: Pasal 36 (4) P3/SPS Kode Etik Jurnalistik	MNC TV	Peringatan (???)

			PP 50/2005		
52	30 Mei	Pemberitaan Pasangan Capres/Cawapres (19-25 Mei 2014)	Tidak diperhatikannya netralitas isi siaran Tidak diperhatikannya prinsip-prinsip jurnalistik UU Penyiaran: Pasal 36 (4) P3/SPS Kode Etik Jurnalistik PP 50/2005	RCTI	Peringatan (???)
53	30 Mei	Pemberitaan Pasangan Capres/Cawapres (19-25 Mei 2014)	Tidak diperhatikannya netralitas isi siaran Tidak diperhatikannya prinsip-prinsip jurnalistik UU Penyiaran: Pasal 36 (4) P3/SPS Kode Etik Jurnalistik PP 50/2005	GlobalTV	Peringatan (???)
54	30 Mei	Pemberitaan Pasangan Capres/Cawapres (19-25 Mei 2014)	Tidak diperhatikannya netralitas isi siaran Tidak diperhatikannya prinsip-prinsip jurnalistik UU Penyiaran: Pasal 36 (4) P3/SPS Kode Etik Jurnalistik PP 50/2005	MetroTV	Peringatan (???)
55	30 Mei	Pemberitaan Pasangan	Tidak diperhatikannya netralitas isi siaran	TV One	Peringatan (???)

		Capres/Cawapres (19-25 Mei 2014)	Tidak diperhatikannya prinsip-prinsip jurnalistik UU Penyiaran: Pasal 36 (4) P3/SPS Kode Etik Jurnalistik PP 50/2005		
56	9 Juni	Pemberitaan Pasangan Capres/Cawapres (2-4 Juni)	Tidak menjaga netralitas isi siaran Perlindungan kepentingan publik Jumlah durasi, frekuensi, dan kecenderungan pemberitaan tidak adil dan berimbang P3: Pasal 11, Pasal 22 (1-3) SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 40 (a), Pasal 71 (1-3).	MetroTV	Teguran Tertulis (???) Ancaman merekomendasikan evaluasi izin frekuensi (IPP)
57	9 Juni	Pemberitaan Pasangan Capres/Cawapres (2-4 Juni)	Tidak menjaga netralitas isi siaran Perlindungan kepentingan publik Jumlah durasi, frekuensi, dan kecenderungan pemberitaan tidak adil dan berimbang P3: Pasal 11, Pasal 22 (1-3) SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 40 (a), Pasal 71 (1-3).	TV One	Teguran Tertulis (???) Ancaman merekomendasikan evaluasi izin frekuensi (IPP)
58	23 Juni	Pemberitaan Pasangan	Pelanggaran perlindungan kepentingan publik	TV One	Teguran Tertulis

		Capres/Cawapres (17 Juni)	Tidak menjaga netralitas isi siaran P3: Pasal 11, Pasal 22 (1-3) SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 40 (a), Pasal 71 (1-3).		Kedua (2) (???)
59	23 Juni	Pemberitaan Pasangan Capres/Cawapres (17 Juni)	Pelanggaran perlindungan kepentingan publik Tidak menjaga netralitas isi siaran P3: Pasal 11, Pasal 22 (1-3) SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 40 (a), Pasal 71 (1-3).	MetroTV	Teguran Tertulis Kedua (2) (???)
60	7 Juli	Program Siaran Jurnalistik (7 Juli) Jokowi umrah (masa tenang)	Pelanggaran perlindungan kepentingan publik Tidak menjaga netralitas isi siaran P3: Pasal 11, Pasal 22 (1-3) SPS: Pasal 11 (1-2), Pasal 40 (a)	MetroTV	Teguran Tertulis (???)
61	8 Juli	Apa Kabar Indonesia Pagi (30 Juni) Mengaitkan PDIP dengan PKI	Pelanggaran perlindungan kepentingan publik Pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik P3: Pasal 11, Pasal 22 (1-3) SPS: Pasal 11 (1), Pasal 40 (a-b)	TV One	Teguran Tertulis (???)
62	8 Juli	Iklan Prabowo versi Pencak Silat (7 Juli)	Melanggar masa tenang Peraturan KPU 16/2014: Pasal 30 (5)	Global TV	Teguran Tertulis (???)

			P3: Pasal 50 SPS: Pasal 71 (6)		
63	8 Juli	Iklan Prabowo versi Pencak Silat (7 Juli)	Melanggar masa tenang Peraturan KPU 16/2014: Pasal 30 (5) P3: Pasal 50 SPS: Pasal 71 (6)	MNC TV	Teguran Tertulis (???)
64	8 Juli	Iklan Prabowo versi Pencak Silat (7 Juli)	Melanggar masa tenang Peraturan KPU 16/2014: Pasal 30 (5) P3: Pasal 50 SPS: Pasal 71 (6)	RCTI	Teguran Tertulis (???)
	9 JULI		PEMILU PRESIDEN		

TV PALING BANYAK MELANGGAR
Siaran Politik/Pemilu 2014
 (20 September 2013 – 8 Juli 2014)

STASIUN TELEVISI	JUMLAH PERINGATAN/ TEGURAN/ SANKSI	KONTEN SIARAN/ IKLAN
RCTI	12 kali	7 / 5
Metro TV	8 kali	5 / 3
TV One	8 kali	4 / 4
Global TV	8 kali	4 / 4
MNC TV / TPI	7 kali	2 / 5
ANTV	3 kali	0 / 3
SCTV	3 kali	0 / 3
Indosiar	3 kali	0 / 3
TVRI	3 kali	1 / 2
TransTV	2 kali	0 / 2
Trans7	2 kali	0 / 2

sumber: diolah dari kpi.go.id